

# Factors Inhibiting Economic Growth of The Community In West Nusa Tenggara Province

Nadia Febrianti\* & Hailuddin

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

## Abstract

This study aims to analyze the factors inhibiting community economic growth in West Nusa Tenggara Province. Based on statistical news from the Central Bureau of Statistics of NTB Province, the low human development index, high poverty rate and open unemployment rate can potentially be a factor inhibiting the economic growth of the community in West Nusa Tenggara Province. This research uses quantitative descriptive method with multiple linear regression analysis tools panel data with Fixed Effect Model (FEM) approach. The data used in this study are secondary data from 2019-2023 for districts / cities in West Nusa Tenggara Province. The independent variables in this study are Human Development Index (HDI), Poverty Level and Open Unemployment Rate while the dependent variable is GRDP. The results showed that the poverty rate and the open unemployment rate had a negative but insignificant effect on GRDP so that these two variables had the potential to inhibit economic growth in NTB Province. While the human development index variable has a positive and significant effect on GRDP, meaning that HDI has no potential as an obstacle to economic growth in West Nusa Tenggara Province

*Keywords:* Human Development Index, Poverty Rate, Open Unemployment Rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP)

## 1. Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Namun, potensi ini belum sepenuhnya mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara signifikan. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini mengalami fluktuasi dengan tantangan yang berasal dari berbagai faktor penghambat. Pada tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 2,30% kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 6,95%, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 1,80%. Meskipun sektor pariwisata dan pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, terdapat kendala yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat (Barat, 2023).

Salah satu faktor penghambat utama pertumbuhan ekonomi di NTB adalah kemiskinan yang masih tinggi. Data terakhir pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB mencapai 13,85%. Menurut (Hardiansyah, 2014), tata kelola ekonomi daerah yang belum optimal menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi sumber daya, infrastruktur yang terbatas, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, tingkat pengangguran di NTB juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut (N Latifah, Rotinsulu, & Tumilaar, 2017; Nenny Latifah, 2017), pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan peningkatan indeks pembangunan manusia menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya lapangan kerja yang berkualitas, terutama di sektor formal, menjadi salah satu penyebab utama tingginya pengangguran di wilayah ini.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya tingkat investasi di NTB. Berdasarkan laporan dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (2012), investasi di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih relatif rendah. Padahal, ketiga sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya dan fasilitas transportasi,

\* Corresponding author.

E-mail address: [nadiafebrianti186@gmail.com](mailto:nadiafebrianti186@gmail.com)

menghambat distribusi barang dan jasa dari daerah pedesaan ke pasar yang besar. Akibatnya, banyak daerah di NTB yang masih terisolasi secara ekonomi dan sulit untuk mengembangkan potensinya.

Di sisi lain, sektor pariwisata yang diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi NTB, juga menghadapi tantangan serius. Meskipun NTB memiliki destinasi wisata yang terkenal, seperti Kuta Mandalika dan 3 Gili, pertumbuhan sektor ini terhambat oleh masalah infrastruktur dan promosi yang kurang maksimal (BPS NTB, 2018). Keterbatasan fasilitas transportasi dan akomodasi di beberapa lokasi wisata menyebabkan turunnya minat wisatawan, baik domestik maupun internasional. Selain itu, bencana alam seperti gempa bumi yang sering melanda NTB juga memberikan dampak negatif pada sektor pariwisata.

Masalah lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di NTB. Degradasi lingkungan, seperti kerusakan lahan pertanian akibat penggunaan bahan kimia berlebihan dan penebangan hutan secara ilegal, telah mengurangi produktivitas sektor pertanian (BPS NTB, 2017). Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat NTB, sehingga kerusakan lingkungan ini memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kebijakan pembangunan yang tidak konsisten dari pemerintah pusat dan daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015), perencanaan strategis pembangunan di NTB sering kali tidak terintegrasi dengan baik antara tingkat pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan implementasi program-program pembangunan tidak berjalan optimal dan sering kali terhambat oleh masalah birokrasi dan korupsi (Novriansyah, 2018).

Keterbatasan pendidikan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di NTB. Berdasarkan data dari Laporan Kajian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2008), banyak masyarakat di NTB yang masih berada di bawah standar pendidikan nasional. Rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Padahal, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan inovatif.

Dalam jangka panjang, strategi pembangunan yang berkelanjutan harus fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan tata kelola ekonomi yang baik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal seperti NTB harus menjadi prioritas nasional dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di NTB (Nasional, 2014).

Meskipun NTB memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi salah satu pusat ekonomi di Indonesia bagian timur, berbagai faktor penghambat yang telah disebutkan di atas harus segera diatasi. Dengan perencanaan pembangunan yang tepat dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, pertumbuhan ekonomi NTB dapat didorong cepat.

Dari semua aspek yang sudah dipaparkan tersebut, bahwa indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka merupakan faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga hal tersebut menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini.

## **2. Kajian Pustaka**

Untuk menyusun teori yang komprehensif penelitian mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), teori ini akan mencakup konsep-konsep dasar yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah teori-teori ekonomi pembangunan dan berbagai model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

### *2.1. Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat provinsi. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi. Model pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) dalam (Novianto, 2018) juga

menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor modal, tenaga kerja, dan teknologi. NTB, pertumbuhan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh sektor-sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata, meskipun peran sektor-sektor ini belum sepenuhnya optimal (Barat, 2023).

Di samping itu, konsep pertumbuhan ekonomi juga terkait erat dengan pemerataan pendapatan. Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, tetapi akan menurun pada tahap selanjutnya. Namun, fenomena ini tidak selalu berlaku di NTB, di mana meskipun ada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial dan kemiskinan masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran, khususnya di daerah pedesaan yang kurang berkembang (Barat, 2023).

## 2.2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan. Menurut Todaro (2011) dalam (Kause & Fithriyah, 2024), kemiskinan bukan hanya masalah ketidakcukupan pendapatan, tetapi juga merupakan hasil dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang memadai. Dalam hal ini, kemiskinan di NTB dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengangguran, inflasi, dan rendahnya kualitas pendidikan (Hardiansyah, 2014).

Kemiskinan dapat dilihat dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan absolut dan relatif. Pendekatan absolut mendefinisikan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara pendekatan relatif melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang dianggap layak dalam suatu masyarakat. Menurut BPS NTB (2018), tingkat kemiskinan di provinsi ini masih cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Masalah kemiskinan ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, serta kurangnya kesempatan kerja yang layak.

Dalam teori pembangunan, pendekatan strukturalis berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil, di mana kelompok masyarakat tertentu mengalami marginalisasi. Sen (1999) dalam (Ayuningsasi et al., 2023) juga mengemukakan teori kapabilitas, di mana kemiskinan dipandang sebagai kekurangan kemampuan seseorang untuk mencapai kehidupan yang layak. Teori ini relevan karena banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti pendidikan dan kesehatan.

## 2.3. Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang yang berada dalam usia produktif tidak memiliki pekerjaan, meskipun sedang mencari pekerjaan. Menurut teori Keynesian, pengangguran terjadi akibat kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, perusahaan cenderung mengurangi produksi dan tenaga kerja, yang kemudian menyebabkan peningkatan pengangguran. Dalam kasus NTB, pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (N Latifah et al., 2017).

Ada beberapa jenis pengangguran, antara lain pengangguran struktural, friksional, dan siklis. Pengangguran struktural terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, sedangkan pengangguran friksional merupakan pengangguran jangka pendek yang terjadi ketika seseorang sedang berpindah pekerjaan. Sementara itu, pengangguran siklis terjadi akibat fluktuasi dalam siklus bisnis. Menurut data BPS NTB (2018), sebagian besar pengangguran di NTB bersifat struktural, di mana rendahnya keterampilan dan pendidikan menjadi faktor penghambat utama bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Untuk mengatasi masalah pengangguran, teori ekonomi menyarankan adanya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan masyarakat dapat mudah memasuki pasar kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat juga dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran, terutama pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh, seperti pariwisata dan pertanian di NTB.

#### 2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas hidup suatu masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai alternatif dari indikator ekonomi tradisional seperti PDB. IPM dianggap sebagai indikator yang komprehensif karena mencakup aspek-aspek sosial tentang pembangunan manusia.

Dalam teori pembangunan manusia, Amartya Sen (1999) dalam (Ayuningsasi et al., 2023) menekankan pentingnya meningkatkan kapabilitas individu, di mana pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang baik. NTB, IPM masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup yang layak (Barat, 2023; Izzah, 2015; SE, 2018). Rendahnya IPM ini berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi tersebut.

Untuk meningkatkan IPM di NTB, pemerintah perlu berfokus pada investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan sering kali terbatas. Menurut (Supraba, 2018), peningkatan IPM dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

#### 2.5. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan IPM erat dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak selalu berarti penurunan kemiskinan, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif dan tidak memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan, yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan.

Pengangguran juga merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan. Ketika tingkat pengangguran tinggi, daya beli masyarakat menurun, yang kemudian memperburuk kondisi kemiskinan. Di sisi lain, peningkatan IPM dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika masyarakat memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan, mereka akan mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan manusia menjadi salah satu kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di NTB (Supraba, 2018).

Teori-teori yang telah dibahas menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan kebijakan yang holistik dan terpadu. Pemerintah daerah di NTB harus mampu mengatasi tantangan-tantangan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan dalam pembangunan manusia untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang dan adil.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB dan literatur relevan diolah menggunakan regresi linear berganda data panel melalui Eviews 12, dengan model kombinasi time series dan cross-section (Widarjono, 2007).

Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

- Y : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- I : Kabupaten/kota di NTB
- T : Waktu (2019 sampai 2023)
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1$ -  $\beta_3$  : Koefisien
- $X_1$  : IPM (Persen)

$X_2$  : Tingkat Kemiskinan (Persen)  
 $X_3$  : Pengangguran (Persen)  
 E : Error term

Tiga pendekatan model regresi data panel dipertimbangkan: Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik ditentukan melalui uji Chow dan uji Hausman, yang masing-masing digunakan untuk menentukan antara CEM atau FEM, dan antara FEM atau REM, tergantung pada nilai probabilitas terhadap alpha sebesar 0,05 (Gujarati, 2021).

Setelah model terbaik dipilih, dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada korelasi antar variabel independen dengan korelasi di bawah 0,80 (Ghozali, 2018) dan uji heteroskedastisitas untuk melihat keseragaman varian residual. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan melalui uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan), dengan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis berdasarkan nilai t atau F hitung dibandingkan dengan t atau F tabel pada signifikansi 0,05. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang lebih baik (Ghozali, 2018)

#### 4. Hasil

Pada penelitian ini diperlukan uji chow untuk menentukan model terbaik antara CEM atau FEM dengan melihat nilai probability. Jika probabilitas  $< \alpha = 0,05$  atau 5% maka dikatakan signifikan, sehingga model terbaik yang digunakan adalah FEM. Ketika nilai probabilitas  $> \alpha = 0,05$  atau 5% maka dikatakan tidak signifikan, maka model yang digunakan CEM. Berikut merupakan hasil uji chow.

##### 4.1. Uji Chow

**Tabel 1.** Hasil Uji Chow untuk Fixed Effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	490.963371	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	239.550744	9	0.0000

Dari hasil uji chow pada tabel 1 didapatkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0.0000 dan nilai Cross-section Chi-square sebesar 0.0000. dengan menggunakan alpa ( $\alpha$ ) = 0,05 atau 5% maka nilai probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square  $< \alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan keputusan sementara model terbaik yang digunakan yaitu FEM.

##### 4.2. Uji Hausman

Pada penelitian ini diperlukan uji hausman dalam statistik yang digunakan untuk pemilihan model regresi data panel yang lebih baik antara FEM dengan REM dengan melihat nilai probability. Jika probability  $< \alpha = 0,05$  atau 5% maka dikatakan signifikan, sehingga model terbaik yang digunakan adalah FEM. Ketika nilai probability  $> \alpha = 0,05$  atau 5% maka dikatakan tidak signifikan, sehingga model terbaik yang digunakan adalah REM. Berikut merupakan hasil regresi uji hausman.\

**Tabel 2.** Hasil Uji Hausman untuk Pemilihan Model Fixed Effect atau Random Effect

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.734979	3	0.0002

Dari hasil uji hausman yang ditunjukkan pada tabel 2 didapatkan nilai probabilitas (p-value) Cross-section random sebesar 0.0002. dengan menggunakan alpha ( $\alpha$ ) = 0,05, maka nilai probabilitas dari Cross-section random lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  (p-value  $< 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan model terbaik data panel pada penelitian ini yang digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM).

Karena model data panel terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model, maka akan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik pada model tersebut dengan cara sebagai berikut:

#### 4.3. Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat korelasi antara variabel independent (X) dimana korelasi antar variabel X harus  $< 0,80$  (Ghozali, 2018). Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas:

**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.696624	0.654901
X2	-0.696624	1.000000	-0.592249
X3	0.654901	-0.592249	1.000000

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas pada tabel 3, maka dapat dilihat bahwa korelasi antar variabel independent (X1, X2 dan X3)  $< 0,80$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### 4.4. Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu dengan melihat nilai probabilitas masing-masing variabel independent. Apabila probabilitas masing-masing variabel independent  $> 0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Berikut ini merupakan hasil uji Heteroskedastisitas:

**Tabel 4.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.023339	0.179420	0.130081	0.8972
X1	-0.001273	0.001957	-0.650416	0.5194
X2	0.005974	0.005090	1.173811	0.2480
X3	-0.002389	0.004043	-0.590969	0.5581

Berdasarkan hasil pengolahan uji heteroskedastisitas pada tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel independent menunjukkan angka  $> 0,05$  atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Dari hasil uji Chow dan uji Hausman disimpulkan bahwa model terbaik untuk mengatasi variabel-variabel tersebut yaitu menggunakan model Fixed effect Model. Dibawah ini merupakan hasil estimasi Fixed Effect Model di maksud.

#### 4.5. Hasil Regresi Fixed Effect Model

**Tabel 5.** Hasil Regresi Fixed Effect Model dan Effects Specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.394137	0.266723	12.72533	0.0000
X1	0.008178	0.002909	2.811058	0.0079
X2	-0.000419	0.007566	-0.055416	0.9561
X3	-0.010182	0.006010	-1.694193	0.0986
Effects Specification				
R-squared	0.993674	Mean dependent var	3.929271	
Adjusted R-squared	0.991623	S.D. dependent var	0.257753	
S.E. of regression	0.023591	Akaike info criterion	-4.436696	
Sum squared resid	0.002059	Durbin-Watson stat	1.672882	
Log likelihood	123.9242			
F-statistic	484.3461			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model yang ditunjukkan pada table 5, maka diperoleh hasil persamaan antara variable dependen (PDRB atas dasar harga konstan) dan variable independent (IPM, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka) sebagai berikut:

$$Y_{it} = 3.3941 + 0.0081X1 - 0.0004X2 - 0.0101X3$$

## 5. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka berikut merupakan hasil pengujian yang dijelaskan secara parsial untuk menggambarkan hubungan antar masing-masing variabel independent dengan variabel dependen yakni sebagai berikut:

### 5.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) dengan PDRB

Didapatkan nilai koefisien IPM (X1) sebesar 0,0081 dengan probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha = 0,05$  atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi NTB. Artinya didalam penelitian ini indeks pembangunan manusia (IPM) bukan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan karena peningkatan IPM, terutama melalui investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadaan ini bisa dimaklumi karena masyarakat yang sehat dan berpendidikan cenderung produktif dan memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi (Supraba, 2018).

### 5.2. Tingkat Kemiskinan (X2) dengan PDRB

Didapatkan nilai koefisien X2 sebesar -0,0004 dengan probabilitas sebesar  $0.0000 < \alpha = 0,05$  atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 (tingkat kemiskinan) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengaruh yang negatif antara variabel X2 terhadap PDRB di NTB ini menunjukkan bahwa kemiskinan berpotensi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini bisa dipahami karena kemiskinan mengakibatkan terbuangnya potensi manusia dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mataheurilla & Rachmawati, 2021) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

### 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) dengan PDRB

Didapatkan nilai koefisien X3 sebesar -0,0101 dengan probabilitas  $0,0986 > \alpha = 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di NTB. Pengaruh yang negatif antara variabel X3 dengan PDRB di NTB ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran juga berpotensi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini disebabkan karena pengangguran dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan keterampilan dan pengalaman kerja, serta meningkatkan beban pemerintah dalam menyediakan tunjangan sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aisyah, 2021) dengan kesimpulan bahwasanya pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

### 5.4. Hubungan Antara Variabel X1, X2, X3 dengan PDRB

Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa dari ketiga variabel independent tersebut memberikan pengaruh yang cukup kuat secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai prob (F-statistik) sebesar  $0.0000 < \alpha = 0,05$  atau 5% yang berarti hasil perhitungan tersebut berpengaruh signifikan. Hasil tersebut juga didukung oleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang didapatkan dari hasil perhitungan model yaitu sebesar 0,9916, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PDRB (Y) dapat dijelaskan oleh variabel dependen yaitu IPM (X1), Tingkat Kemiskinan (X2) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) sebesar 99,16% sedangkan sisanya sebesar 0,84% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. Hal ini juga mencerminkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang cukup bagus dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam analisis regresi data panel untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan koefisien sebesar 0,0081, menandakan bahwa peningkatan IPM, khususnya melalui pendidikan dan kesehatan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan dengan koefisien -0,0004, yang menunjukkan potensi kemiskinan sebagai penghambat, meskipun tidak signifikan dalam model ini. Variabel tingkat pengangguran terbuka juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB dengan koefisien sebesar -0,0101, mengindikasikan bahwa pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui penurunan produktivitas.

Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut (IPM, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di NTB, dibuktikan dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 5%. Tingkat koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 99,16% mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam PDRB, sedangkan 0,84% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki validitas yang tinggi dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.

## References

- Aisyah, Aisyah. (2021). *Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Utara*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Ayuningsasi, Anak Agung Ketut, Budhi, Made Kembar Sri, Yasa, I. Nyoman Mahaendra, Marhaeni, AAIN, Sudibia, I. Ketut, & Dewi, Made Heny Urmila. (2023). CAN THE WELFARE OF HINDU CLERGY IN BALI BE ASSESSED USING AMARTYA SEN'S CAPABILITY APPROACH. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(1), 121–137.
- Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka (2018-2023)*. Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Gujarati, Damodar N. (2021). *Essentials of econometrics*. Sage Publications.
- Hardiansyah, Mochamad Fitra. (2014). *Pengaruh tata kelola ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara*.
- Izzah, Nurul. (2015). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Riau tahun 1994-2013. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 156–172.
- Kause, Jeremia, & Fithriyah, Fithriyah. (2024). Analisis Determinan Kemiskinan Multidimensi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 4(2 SE-Articles), 115–127. <https://doi.org/10.23969/jrie.v4i2.98>
- Latifah, N, Rotinsulu, D. C. H., & Tumilaar, R. L. H. (2017). Effect of Economic Growth and Human Development Index on Unemployment Rate and Number of Poor People in Manado City. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(2), 106–117.
- Latifah, Nenny. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dampaknya pada jumlah penduduk miskin di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02).
- Mataheurilla, Bimbi Resti, & Rachmawati, Lucky. (2021). Pengaruh IPM, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Malang. *INDEPENDENT: Journal Of Economics*, 1(3), 129–145.
- Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan. (2014). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Novianto, Setyo. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*.
- Novriansyah, Mohamad Arif. (2018). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 59–73.
- SE, M. ZAINAL. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia

(Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Dan Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat 2010-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).

Supraba, Sylvia Yasmin. (2018). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015*.

Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika: teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia.